

Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia dan Korelasinya terhadap Kualitas Hidup Perempuan

Hidayatul Azqia¹, M. Mahbubi Ali², Saniatun Nurhasanah³

¹²³Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkia

Abstract. *This thesis discusses and provides an overview of the Islamic financial inclusion index in Indonesia and its correlation with women's quality of life. This study uses a descriptive quantitative approach with the method of calculating the Index of Sharia Financial Inclusion (ISFI) developed by Sarma, (2012) and Pearson's correlation coefficient developed by Gupta et al., (2014). The data from this study uses secondary data obtained from the publications of the Financial Services Authority, the Central Statistics Agency and the Ministry of Child Protection and Women's Empowerment of the Republic of Indonesia. The study covers 33 provinces for the 2015-2020. The results of this study found that the level of Islamic financial inclusion in Indonesia based on the 2015-2020 period was still relatively low at 0.105. Based on the observations, the provinces of DKI Jakarta and Nanggroe Aceh Darussalam, they are the most superior provinces in measuring the Islamic financial inclusion index in this study, with the acquisition value of each province respectively 0.531 and 0.435 or in other words, only these 2 provinces are included in the list. The remaining medium category is provinces with a low financial inclusion category. On the other hand, East Nusa Tenggara province occupies the lowest position in the Islamic financial inclusion index level with an index score of only 0.002. This study also found that the Islamic financial inclusion index (ISFI) has a positive relationship to women's quality of life (IPG) with an r-Pearson value of 0.261, the ISFI coefficient value of 7.811 and a significance of 0.0002 (smaller than alpha 0.05). These results indicate that changes in the level of Islamic financial inclusion will result in changes in women's quality of life (IPG) in the same direction or if the ISFI index increases by one unit it will increase the GPA index by 7.811.*

Keywords: *Sharia Financial Inclusion, Women's Quality of Life, Indonesia*

Abstrak, *Skripsi ini membahas dan memberikan gambaran mengenai indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia dan korelasinya dengan kualitas hidup perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode perhitungan Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) yang dikembangkan oleh Sarma, (2012) dan Pearson's correlation coefficient yang dikembangkan oleh Gupta et al., (2014). Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik serta Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua provinsi di Indonesia berdasarkan data OJK dan BPS tahun 2015-2020 yang berjumlah 33 provinsi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan periode 2015-2020 masih tergolong rendah yakni berada pada nilai 0,105. Kemudian jika diamati secara provinsi DKI Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang paling unggul dalam pengukuran indeks inklusi keuangan syariah dalam penelitian ini, dengan perolehan nilai masing-masing provinsi secara berurutan adalah 0,531 dan 0,435 atau dengan kata lain hanya 2 provinsi ini yang masuk ke dalam kategori medium sisanya adalah provinsi dengan kategori inklusi keuangan rendah. Sebaliknya provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki posisi terendah tingkat indeks inklusi keuangan syariah dengan skor indeks hanya 0,002. Studi ini*

juga menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup perempuan (IPG) dengan nilai r-pearson 0,261, pada nilai koefisien ISFI sebesar 7,811 dan signifikansi sebesar 0,0002 (lebih kecil dari alpha 0,05). Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inklusi keuangan syariah akan mengakibatkan perubahan kualitas hidup Perempuan (IPG) secara searah atau jika indeks ISFI meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan indeks IPG sebesar 7,811.

Kata Kunci : *Inklusi Keuangan syariah, Kualitas Hidup Perempuan, Indonesia*

Introduction

Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dalam suatu negara merupakan hal yang esensial dalam bidang ekonomi. Banyak upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah diantaranya aksesibilitas sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki peranan penting untuk memediasi para *surplus income community* kepada *deficit income community*. Namun dalam kenyataannya di tengah perkembangan institusi keuangan tersebut belum tentu disertai dengan kemudahan akses bagi setiap golongan masyarakat, padahal akses layanan jasa keuangan merupakan unsur penting dalam sistem perekonomian nasional maupun internasional (Resendiz, 2017).

Berdasarkan Global Index Database 2017 masih ada sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akun di lembaga keuangan atau melalui penyedia uang seluler. Selain itu berdasarkan dokumen Conomy SEA 2019 yakni hasil riset yang dilakukan oleh Google, TEMASEK, dan BAIN & COMPANY masih ada 198 juta masyarakat ASEAN yang belum mendapatkan akses finansial atau perbankan sama sekali, dan 92 jutanya merupakan masyarakat Indonesia. (google et al., 2019) Dimana kondisi semacam ini disebut dengan *financial exclusion* (keuangan eksklusif) ialah kondisi dimana seseorang mengalami hambatan dalam mengakses ataupun memanfaatkan jasa maupun produk keuangan sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial dalam masyarakat tempat mereka tinggal. (European Commission, 2008)

Dalam rangka menanggapi kasus *financial exclusion* ini lahir konsep *financial inclusion* ataupun keuangan inklusif ialah upaya menghilangkan seluruh wujud hambatan yang berupa harga ataupun nonharga, terhadap akses seseorang dalam menggunakan layanan jasa keuangan yang berkualitas, tepat waktu, mudah, serta nyaman dengan anggaran terjangkau berdasarkan kebutuhan serta kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan (Peraturan Presiden, 2020).

Istilah *Financial inclusion* menjadi tren paska krisis 2008 yang didasari karena dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Miraza, 2014).

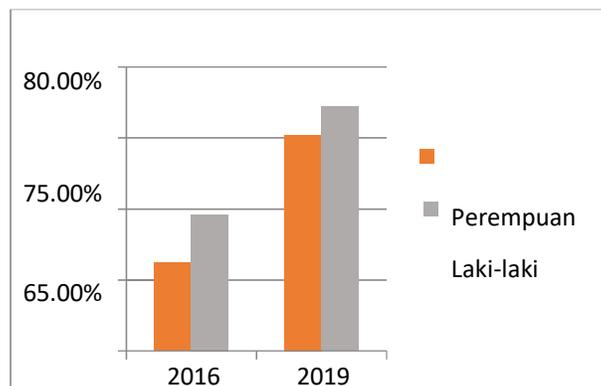
Mengingat pentingnya isu ini, pembahasan keuangan inklusif menjadi agenda penting di tingkat nasional maupun internasional. Banyak organisasi dan institusi internasional yang menjadikan keuangan inklusif sebagai fokus perhatian dan agenda pembangunan seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), G20, ASEAN, *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), CGAP, World Bank, *Asian Development Bank* (ADB), BIS, *Financial Action Task Force* (FATF), UNDP dan bahkan di Indonesia sendiri telah menjadi agenda prioritas pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 114 Tahun 2020 revisi dari Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sebenarnya di Indonesia SNKI ini telah dimulai sejak tahun 2012 dengan diterbitkannya dokumen SNKI untuk pertama kalinya, selanjutnya 2013 diterbitkan dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, kemudian 2019 ada Dokumen SNKI khusus Pemuda dan terakhir pada 9 Juni 2020 lalu SNKI khusus Perempuan di launching.



Gambar 1 Peta Perjalanan SNKI

Sumber: Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

Selanjutnya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya terkait inklusi dan literasi keuangan syariah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun sayangnya tingkat inklusi dan literasi keuangan Syariah di Indonesia hanya sebesar 9% dan 8,9%, sangat jauh tertinggal dari keuangan konvensional yakni sebesar 76,19% dan 38,03%. (OJK, 2019) Dan dari data tersebut diketahui ada 50% masyarakat Indonesia termasuk perempuan tidak mengerti dengan produk keuangan yang mereka gunakan. Otoritas Jasa Keuangan (2019) melaporkan bahwa indeks inklusi perempuan masih lebih rendah yakni sebesar 75,2% dibandingkan dengan indeks inklusi laki-laki yakni sebesar 77,2% meningkat dibandingkan dengan hasil survei tahun 2016 lalu.



Gambar 2 Capaian Inklusi Keuangan Perempuan dan Laki-laki

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hal ini sangat disayangkan karena perempuan merupakan pemangku utama dalam mengatur keuangan terkhususnya di dalam rumah tangga agar dapat melahirkan generasi yang kuat secara ekonomi, hal tersebut telah termaktub dalam Q.S An-Nisa Ayat 9, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al Misbah karangan M. Quraish Shihabayat ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang berupa harta/materi, dan juga immateri seperti pendidikan serta pembinaan iman dan takwa. Imam Nawawi juga

mengungkapkan bahwa maksud dari *dzurriyatan dhi'afan* (keturunan yang lemah) yakni jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, baik dari segi ekonomi (yang menyebabkan kemiskinan), agama, akhlak maupun pengetahuan. (Shihab, 2002)

Selanjutnya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) atau sekarang bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari TNP2K, saat ini terdapat 21.969.925 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah di Indonesia dan sekitar 19% merupakan rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2020) 36,67% perempuan (35,34 juta) dari jumlah penduduk perempuan usia produktif mengurus rumah tangga, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang angkanya hanya 3,99% mengurus rumah tangga. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2019)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan yang positif antara inklusi keuangan dengan tingkat kesejahteraan perempuan termasuk beberapa diantaranya telah dikemukakan oleh Muhammad Yunus seorang penerima Nobel Perdamaian atas upayanya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial yang berangkat dari ekonomi kecil melalui kredit mikro, Yunus mendirikan sebuah Grameen Bank dengan sasaran utama adalah perempuan miskin. (Yunus & Jolis, 2006) Tidak hanya Yunus peneliti lain seperti Mahadi et al., (2019) mengungkapkan bahwa dengan inklusi keuangan perempuan mengurus rumah tangga berhak memiliki akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sakanko, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan ada hubungan positif antara inklusi keuangan dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan yang menguntungkan, tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Asmawati & Ahmad, (2015) dari hasil penelitiannya menunjukkan inklusi keuangan melalui mikrofinance syariah dapat meningkatkan pendapatan kaum perempuan. Nugroho & Chowdhury, (2015) menemukan dengan adanya akses terhadap lembaga keuangan dapat meningkatkan profesionalisme

pengusaha perempuan yang berarti dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Arnold & Gammage, (2019) menemukan melalui inklusi keuangan digital dapat membantu perempuan memenuhi kebutuhan finansial mereka yang selama ini masih terbatas, karena dengan keuangan digital tersebut lahir produk-produk keuangan yang khusus dapat memenuhi kebutuhan perempuan, dengan begitu dapat membantu mereka memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Lebih khusus lagi, Elrahman & Ali, (2019) menemukan pemberdayaan perempuan melalui inklusi keuangan syariah mampu membantu perempuan di Comoros keluar dari kemiskinan. Muhammad, (2018) juga menemukan bahwa dengan adanya inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan perempuan menggunakan instrumen wakaf tunai dapat mencegah anak perempuan-perempuan di Kano merantau ke kota untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Oleh karena itu mengingat pentingnya inklusi keuangan khususnya bagi perempuan yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan Negara, sudah selayaknya kajian terkait inklusi keuangan syariah khusus bagi perempuan menjadi agenda yang penting dan menarik untuk dilakukan baik oleh para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Selain itu kajian yang berfokus pada pengukuran dan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kualitas hidup perempuan dirasakan masih sangat terbatas dan menjadisalah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam case ini menjadi kurang optimal apalagi akhir-akhir ini pemerintah sedang fokus menangani program inklusi keuangan syariah dan Inklusi Keuangan Perempuan, namun dokumen resmi SNKIP (Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan) belum diterbitkan padahal telah di *launching* pada 20 Juni 2020 lalu, disebabkan karena keterbatasan literatur kajian ilmiah.

Guna menutup gap tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis dan mengukur inklusifitas keuangan syariah 33 Provinsi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan, penelitian ini menjadi berbeda

dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma, (2012), Sanjaya dan Nursechafia, (2016), Kumari & Azam, (2019) dan Sakanko, (2020) yang masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks non-syariah (konvensional), berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al., (2019) dan Umar, (2017) yang melihat pengaruhnya terhadap HDI (*Human Development Index*) dengan menggunakan data tahun 2014-2017 dan 2010-2015, selain itu berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati & Ahmad, (2015), Yaumidin et al., (2017), Muhammad, (2018) dan Mahadi et al. (2019) yang mengkaji peran inklusi keuangan syariah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Maka penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih khusus menghitung indeks inklusi keuangan syariah³³ Provinsi di Indonesia menggunakan data Perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta pengaruhnya khusus terhadap kualitas hidup perempuan menggunakan data tahun 2015- 2020 mengingat pada tahun 2019 telah dilakukan survei indeks inklusi dan literasi keuangan syariah oleh OJK sebagai pembaharuan dari survey pada tahun 2016. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi dan keuangan inklusif khusus bagi perempuan dengan berdasarkan pada bukti dan temuan empiris.

Literature Review

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) dan *Pearson Correlation*. Pendekatan ISFI digunakan untuk menganalisis dan mengukur keuangan inklusif syariah 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan *Pearson Correlation* digunakan untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap kualitas hidup perempuan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) RI, dengan rentang waktu sejak 2015 hingga 2020.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif berfungsi untuk memaparkan hasil perhitungan inklusi keuangan syariah 33 provinsi di Indonesia yang akan disajikan dalam grafik dan tabel dengan penjelasan deskriptif atas hasil dari perhitungan ISFI yang diperoleh. Selanjutnya metode kuantitatif yang digunakan yakni *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) dengan menggunakan Microsoft Excel, yang dikembangkan oleh Sarma, (2012) dan *Pearson's correlation coefficient* dengan menggunakan aplikasi *Eviews* yang dikembangkan oleh Gupta et al., (2014) metode ini digunakan untuk mengetahui korelasi antara *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks inklusi keuangan syariah dibangun berdasarkan tiga dimensi yaitu: (i) aksesibilitas (ii) ketersediaan dan (iii) pengguna. Dimensi pertama yakni aksesibilitas (D1) mencerminkan tingkat penetrasi lembaga perbankan syariah. Dimensi kedua yakni ketersediaan (D2) diukur dengan jumlah perbankan syariah di setiap provinsi. Dan selanjutnya penggunaan (D3) menunjukkan total pembiayaan perbankan syariah per total PDB regional.

Results and Discussion

Gambaran Indeks Inklusi Keuangan Syariah 33 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data statistik perbankan syariah di Indonesia yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019, dalam hal ini peneliti menggunakan dimensi aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengacu pada metode perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma, (2012) menunjukkan hasil sebagai berikut.

Statistik Deskriptif Tiga Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Tabel 1 berisi statistik deskriptif tiga dimensi inklusi keuangan syariah 33 provinsi di Indonesia. Tabel tersebut menyajikan berbagai indikator statistik, yang terdiri dari minimum (min), maksimum (max), rata-rata (mean) dan simpangan

baku (set. dev) bervariasi dari seluruh periode yang diamati (2015-2020).

Tabel 1 Statistik Deskriptif Tiga Dimensi Inklusi Keuangan

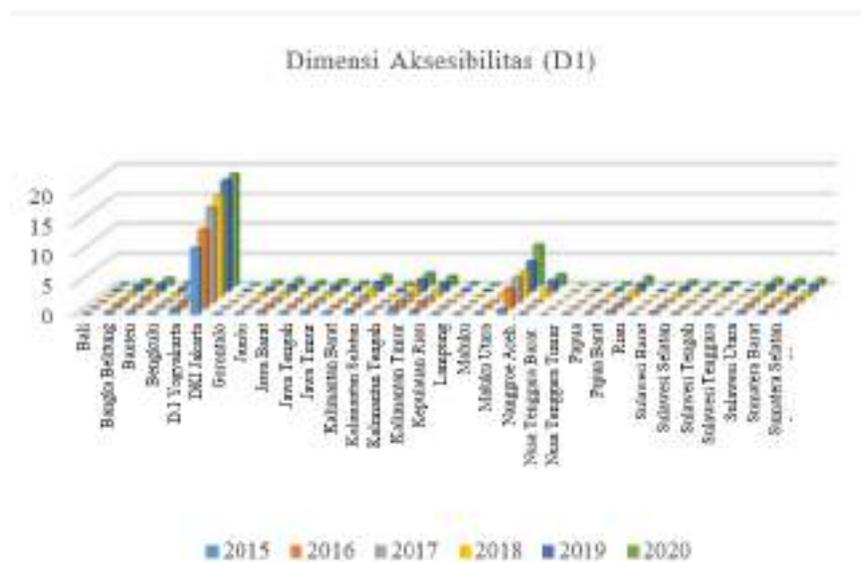
Aksesibilitas (D1)							
<i>Stat,</i>	201	2016	2017	2018	2019	2020	<i>Aver</i>
	5						<i>age</i>
	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<i>Min</i>	23	3	2	5	5	6	4
<i>Max</i>	11,	13,2	15,9	17,1	18,7	18,8	15,8
	165	70	47	51	47	21	50
<i>Mea</i>	0,7	0,96	1,13	1,28	1,44	1,56	1,19
<i>n</i>	65	4	8	0	8	8	4
<i>Std,</i>	1,8	2,28	2,75	2,94	3,23	3,32	2,73
<i>Dev,</i>	87	3	6	7	1	4	8
Ketersediaan (D2)							
<i>Stat,</i>	201	2016	2017	2018	2019	2020	<i>Aver</i>
	5						<i>age</i>

<i>Min</i>	0,0	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	78	8	8	8	8	5	8
<i>Max</i>	3,1	3,36	3,48	3,64	4,02	6,55	4,04
	61	4	5	5	5	9	0
<i>Mea</i>	0,9	0,96	0,96	0,99	1,02	1,04	0,99
<i>n</i>	84	0	0	5	1	2	4
<i>Std,</i>	0,6	0,73	0,73	0,75	0,80	1,13	0,79
<i>Dev,</i>	14	1	2	2	5	8	5
Penggunaan (D3)							
<i>Stat,</i>	201	2016	2017	2018	2019	2020	<i>Aver</i>
	5						<i>age</i>
<i>Min</i>	2,8	2,78	2,50	2,16	1,90	1,90	2,35
	49	6	0	4	3	8	2
<i>Max</i>	61,	114,	117,	114,	127,	221,	126,
	182	406	073	570	447	841	087
<i>Mea</i>	16,	20,5	22,0	24,3	26,1	31,1	23,4
<i>n</i>	775	61	17	68	13	09	90
<i>Std,</i>	11,	20,8	22,1	24,4	26,9	40,7	24,4
<i>Dev,</i>	497	16	63	86	48	63	46

Pada dimensi aksesibilitas (D1), Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata secara bertahap jumlah simpanandana pihak ketiga BUS, UUS dan BPRS yakni dari Rp 765 Juta pada tahun 2015 hingga Rp 1,568 miliar pada tahun 2020. Dari 2015-2020 nilai rata-rata jumlah dana pihak ketiga pada BUS, UUS dan BPRS per 1.000 Penduduk adalah Rp 1,194 miliar. Selanjutnya jika kita amati dari 33 provinsi di Indonesia (lihat Gambar 10) DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah dana pihak ketiga paling tinggi yakni dengan rata-rata selama 6 tahun (2015-2020) sebesar Rp 15,85 miliar per 1.000 orang penduduk. Tingginya

aksesibilitas perbankan syariah di DKI Jakarta merupakan hal yang wajar mengingat DKI Jakarta merupakan Ibu kota Indonesia yang menjadi pusat perekonomian pemerintah di Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 4,06 miliar per 1.000 orang penduduk.

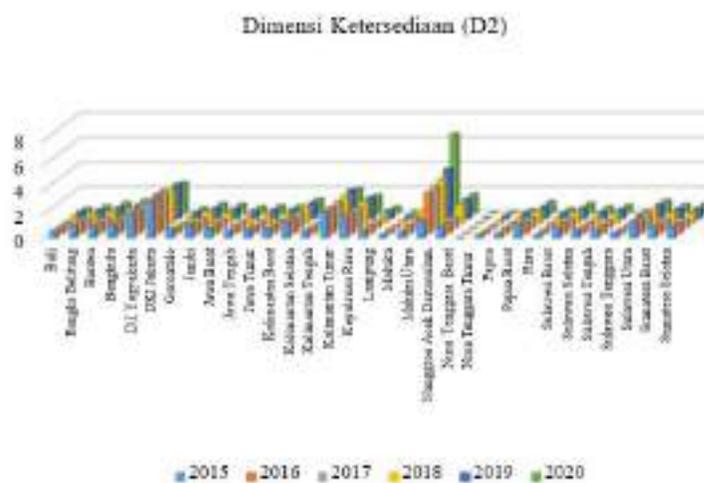
Kemudian provinsi Kalimantan Timur menempati posisi ke 3 sebagai provinsi dengan aksesibilitas tertinggi yakni sebesar Rp 1,68 miliar per 1.000 orang penduduk. Adapun provinsi dengan aksesibilitas paling rendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah DPK sebesar 24 Juta per 1.000 orang penduduk, angka tersebut terjadi karena berdasarkan hasil survei indeks literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 provinsi NTT menunjukkan indeks 0,0% dan pada tahun 2019 menunjukkan angka 1,31 % yang mengartikan bahwa pada tahun 2015- 2018 dari 100 orang penduduk belum ada satupun yang memahami dengan baik terkait keuangan syariah dan pada tahun 2019 hanya ada 1 dari 100 orang yang memiliki pengetahuan dengan baik mengenai keuangan syariah sehingga masyarakat di provinsi NTT masih sangat sedikit yang menempatkan dananya pada perbankan syariah.



Gambar 3 Dimensi Aksesibilitas (D1) 33 Provinsi di Indonesia

Sumber: Penulis (2021)

Dimensi ketersediaan diukur dengan total distribusi jaringan perbankan syariah, termasuk kantor pusat, kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu, unit usaha syariah dan kantor kas. Berkenaan dengan dimensi ketersediaan (D2), rata-rata penetrasi perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) per 100.000 orang penduduk adalah 0,99 unit atau dengan kata lain tersedia 9 unit untuk melayani 1 juta penduduk. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi dengan penetrasi tertinggi sebesar 3,75 unit per 100.000 orang penduduk. Hal ini tentu berkaitan erat dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mewajibkan lembaga keuangan (baik bank maupun non Bank) untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasional dan layanannya, tidak hanya itu konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016 yang menjadikannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya peringkat ketersediaan tertinggi ke 2 adalah DKI Jakarta dan disusul Kalimantan Timur dengan rata-rata penetrasiperbankan syariah masing-masing sebesar 2,87 unit dan 2,20 unit per 100.000 orang penduduk (lihat Gambar 11). Dimensi ketersediaan pada 3 provinsi tersebut melebihi rata-rata keseluruhan nilai penetrasi perbankan syariah.

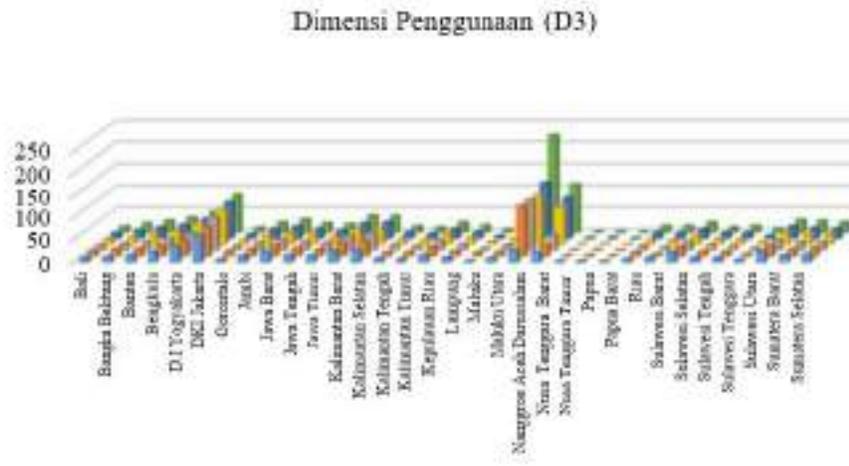


Gambar 4 Dimensi Ketersediaan (D2) 33 Provinsi di Indonesia

Sumber: Penulis (2021)

Selanjutnya untuk menghitung keuangan yang inklusif memiliki rekening pada bank syariah tidaklah cukup, karena keberadaan jasa keuangan syariah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dimensi Penggunaan (D3) mengukur sejauh mana lembaga perbankan syariah dapat memberikan berbagai produk kepada nasabahnya, seperti fasilitas pembiayaan, deposito, remitansi, transfer dan lain-lain. Dalam penelitian ini dimensi penggunaan (D3) menghitung proporsi pembiayaan pada BUS, UUS dan BPRS terhadap PDRB daerah. Dari tabel 5 diketahui bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata penggunaan pembiayaan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sebesar Rp 23,49 miliar.

Jika dilihat dari Gambar 12 dari 33 provinsi, Nanggroe Aceh Darussalam menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penggunaan layanan perbankan syariah tertinggi yakni dengan rata-rata pembiayaan sebesar Rp 120,38 miliar. Diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai rata-rata pembiayaan sebesar Rp 75,55 miliar dan Nusa Tenggara Barat berada di posisi ketiga dengan rata-rata pembiayaan sebesar Rp 62,36 miliar. Sedangkan di posisi terendah adalah provinsi Papua Barat hanya dengan nilai rata-rata pembiayaan sebesar Rp 2,35 miliar pada periode 2015-2020. Penting untuk dicatat bahwa konversi Bank Aceh menjadi bank syariah secara penuh pada tahun 2016 telah meningkatkan secara signifikan jumlah pembiayaan perbankan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam yakni menunjukkan peningkatan sebesar 4x lipat dibandingkan pada tahun 2015.



Gambar 5 Dimensi Penggunaan (D3) 33 Provinsi di Indonesia

Sumber: Penulis (2021)

Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Setelah membahas statistik deskriptif yang berkaitan dengan tiga dimensi inklusi keuangan syariah, sub bagian ini akan membahas tentang pengembangan indeks inklusi keuangan syariah. Tabel 2 di bawah ini berisi nilai minimum (min), maksimum (max), rata-rata (mean) dan standar deviasi (std. dev.) dari masing-masing komponen dalam indeks inklusi keuangan syariah.

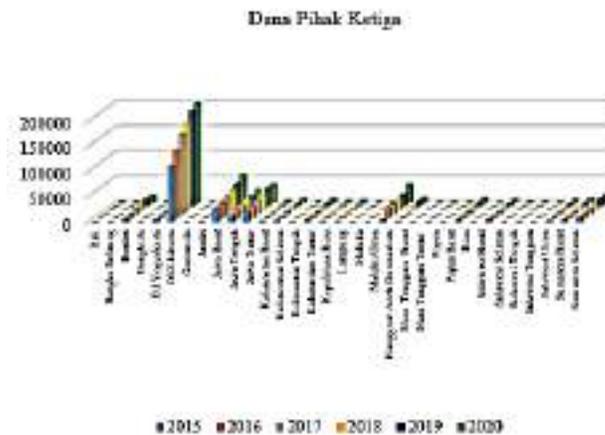
Tabel 2 Statistik Deskriptif Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Aksesibilitas (d1)							
Stat,	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average
Min	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,000
Max	0,59 3	0,70 5	0,84 7	0,91 1	0,99 6	1,00 0	0,842
Mean	0,04 0	0,05 0	0,05 9	0,06 7	0,07 6	0,08 2	0,062
Std, Dev,	0,10 0	0,12 1	0,14 7	0,15 7	0,17 2	0,17 7	0,146
Indeks Ketersediaan (d2)							
Stat,	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average
Min	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,000
Max	0,47 6	0,50 7	0,52 6	0,55 1	0,60 9	1,00 0	0,611
Mean	0,14 0	0,13 6	0,13 6	0,14 2	0,14 6	0,14 9	0,142
Std, Dev,	0,09 5	0,11 3	0,11 3	0,11 6	0,12 4	0,17 5	0,123
Indeks Penggunaan (d3)							
Stat,	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average
Min	0,00 4	0,00 4	0,00 3	0,00 1	0,00 0	0,00 0	0,002
Max	0,27 0	0,51 2	0,52 4	0,51 2	0,57 1	1,00 0	0,565
Mean	0,06 8	0,08 5	0,09 1	0,10 2	0,11 0	0,13 3	0,098
Std, Dev,	0,05 2	0,09 5	0,10 1	0,11 1	0,12 3	0,18 5	0,111

Berdasarkan Tabel 2 di atas, penelitian ini menemukan bahwa indeks ketersediaan (d2) memiliki nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 0,142, disusul oleh indeks penggunaan (d3) dengan nilai rata-rata 0,098 dan yang terakhir adalah indeks aksesibilitas (d1) sebesar 0,062. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi ketersediaan (d2) dan penggunaan (d3) berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Angka rata-rata tertinggi untuk dimensi ketersediaan (d2) mengungkapkan bahwa keberadaan kantor pusat, kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu, unit usaha syariah dan kantor kas di berbagai pelosok Indonesia sangat membantu dalam meningkatkan indeks inklusi keuangansyariah di Indonesia mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Walaupun saat ini kita telah memasuki industry 4.0 dimana seharusnya bank sudah tidak begitu membutuhkan kantor cabang, namun nyatanya di Indonesia kantor cabang ini masih tetap dibutuhkan mengingat daerah-daerah di Indonesia infrastruktur digitalnya masih belum

dapat menjangkauseluruh kawasan di Indonesia dan literasi digital masyarakat Indonesia juga masih rendah yakni berada di angka 3,17 (Setu,2020). Oleh sebab itu selain dengan layanan online, layanan offline masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Tidak hanya itu dimensi penggunaan menempati posisi kedua mengungkapkan bahwa perbankan syariah tersebut berkinerja baik dalam menyalurkan pembiayaan kepadanasabahnya, karena sebagai media perantara antara *surplus income community* dengan *deficit income community* sudah seharusnya menghidupkan sektor-sektor riil, agar keberadaanya sebagai penggerak ekonomi betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena tidak ada artinya jika simpanan danapihak ketiga besar namun tidak disalurkan kesektor riil namun penelitian ini telah membuktikan bahwa bank syariah hadir untuk menghidupkan sektor riil.



Gambar 6 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah 33 Provinsi di Indonesia

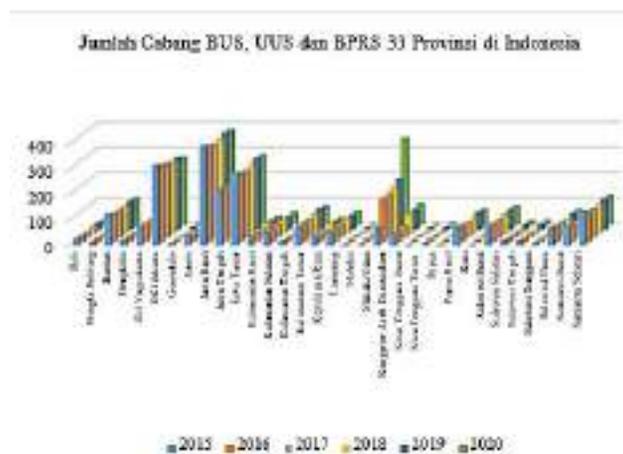
Sumber: Penulis (2021)

Hasil temuan lain dari penelitian ini adalah distribusi yang tidak merata dari danapihak ketiga bank syariah 33 provinsi yang menjadi objek penelitian (lihat Gambar 7). Tingkat dana pihak ketiga perbankan syariahIndonesia bagian Barat cenderung lebih besar dari pada Indonesia bagian tengah dan timur. Khususnya provinsi-provinsi di pulau Jawa seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Timur, Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta. Adapun provinsi dengan rata-rata dana pihak ketiga tertinggi dari 2015- 2020 adalah DKI Jakarta yakni sebesar Rp 162,2 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, secara berurutan memiliki nilai rata-rata Rp 39,5 triliun dan 29,1 triliun. Sedangkan 3 provinsi dengannilai dana pihak ketiga terendah adalah Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp 123 juta, Sulawesi barat dengan nilai Rp 222 juta dan Gorontalo sebesar Rp 238 juta.

Gambar 7 Distribusi BUS, UUS dan BPRS 33Provinsi di Indonesia

Sumber: Penulis (2021)



Jawa. Di lain sisi, Indonesia bagian tengah dan timur, memiliki cabang bank syariah yang tergolong masih sedikit. Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan besar bagi bank syariah untuk menghadirkan cabang bank sampai ke segala penjuru Indonesia agar dapat menjangkau masyarakat-masyarakat di berbagai pulau Indonesia.

Tabel 3 Indeks Inklusi Keuangan Syariah 33 Provinsi di Indonesia

Indeks Inklusi Keuangan Syariah										
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average	Rank	Kategori	
Bali	0.051	0.047	0.048	0.048	0.050	0.046	0.048	25	Rendah	
Bangka Belitung	0.081	0.084	0.079	0.072	0.078	0.079	0.079	18		
Banten	0.088	0.084	0.090	0.096	0.103	0.104	0.094	11		
Bengkulu	0.103	0.100	0.104	0.112	0.114	0.121	0.109	9		
D.I Yogyakarta	0.182	0.176	0.184	0.199	0.202	0.208	0.192	3		
DKI Jakarta	0.448	0.484	0.535	0.555	0.583	0.580	0.531	1	Medium	
Gorontalo	0.057	0.045	0.038	0.042	0.042	0.043	0.045	27	Rendah	
Jambi	0.091	0.072	0.075	0.084	0.086	0.088	0.083	17		
Jawa Barat	0.088	0.088	0.089	0.091	0.096	0.103	0.093	12		
Jawa Tengah	0.062	0.064	0.067	0.072	0.074	0.071	0.068	21		
Jawa Timur	0.068	0.066	0.068	0.072	0.076	0.075	0.071	20		
Kalimantan Barat	0.085	0.093	0.096	0.100	0.101	0.104	0.097	10		
Kalimantan Selatan	0.128	0.130	0.146	0.140	0.145	0.146	0.139	7		
Kalimantan Tengah	0.050	0.042	0.045	0.046	0.047	0.051	0.047	26		
Kalimantan Timur	0.161	0.162	0.165	0.175	0.185	0.171	0.170	5		
Kepulauan Riau	0.137	0.143	0.143	0.147	0.149	0.142	0.144	6		
Lampung	0.056	0.056	0.057	0.060	0.061	0.059	0.058	23		
Maluku	0.019	0.027	0.021	0.023	0.019	0.020	0.022	31		
Maluku Utara	0.049	0.056	0.075	0.084	0.090	0.089	0.074	19		
Nanggroe Aceh Darussalam	0.131	0.102	0.126	0.131	0.182	0.140	0.135	2		Medium
Nusa Tenggara Barat	0.090	0.091	0.107	0.132	0.164	0.192	0.119	4		Rendah
Nusa Tenggara Timur	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	33		
Papua	0.021	0.016	0.016	0.016	0.014	0.010	0.015	32		
Papua Barat	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.024	0.030	29		
Riau	0.088	0.077	0.078	0.084	0.092	0.096	0.086	14		
Sulawesi Barat	0.032	0.023	0.030	0.038	0.042	0.045	0.035	28		
Sulawesi Selatan	0.088	0.083	0.082	0.084	0.088	0.088	0.085	15		
Sulawesi Tengah	0.056	0.047	0.049	0.052	0.053	0.052	0.052	24		
Sulawesi Tenggara	0.057	0.057	0.058	0.059	0.064	0.066	0.060	22		
Sulawesi Utara	0.034	0.022	0.023	0.020	0.025	0.026	0.025	30		

Sumatera Barat	0,1 20 0,0	0,1 12 0,0	0,1 10 0,0	0,1 09 0,0	0,1 18 0,0	0,1 18 0,0	0,11 5 0,08	8
Sumatera Selatan	82	72	78	86	92	94	4	16
Sumatera Utara	0,0 88	0,0 82	0,0 83	0,0 87	0,0 91	0,0 92	0,08 7	13
Indonesia	0,0 89	0,0 95	0,1 00	0,1 08	0,1 14	0,1 23	0,10 5	

Untuk lebih detailnya hasil perhitungan indeks inklusi keuangan syariah 33 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa total rata-rata indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020 ada pada angka 0,105. Angka ini tergolong rendah berdasarkan standar ukur yang dikemukakan oleh Sarma, (2012). Dengan ketentuan, nilai indeks kurang dari 0,3 termasuk kategori rendah, nilai indeks berada di antara 0,3 dan 0,6 termasuk dalam kategori medium, dan nilai indeks antara 0,6 dan 1 masuk ke dalam kategori tinggi. Dengan demikian, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat indeks inklusi keuangan syariah yang rendah. Yakni dari total 33 provinsi di Indonesia ada 31 provinsi dengan indeks inklusi keuangan syariah dalam kategori rendah dan hanya 2 provinsi yang masuk dalam kategori medium yakni DKI Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga dengan begitu belum ada provinsi yang masuk dalam kategori tinggi. Namun dengan perkembangan saat ini dibandingkan dengan negara lain di Asia Pasifik, Indonesia tercatat sebagai negara paling progresif pertumbuhan keuangan inklusinya berdasarkan laporan World Bank 2017 dalam Global Financial Inclusion Index (FINDEX). Adapun 3 provinsi dengan nilai ISFI tertinggi dan terendah dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4 3 Provinsi dengan Nilai ISFI Tertinggi dan Terendah

Index Inklusi Keuangan Syariah								
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average	Rank
DKI Jakarta	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.53	1
	48	84	35	55	83	80	1	

Nanggroe Aceh	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.43	2
Darussalam	31	02	26	31	82	40	5	
D.I Yogyakarta	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.19	3
	82	76	84	99	02	08	2	
Maluku	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	31
	19	27	21	23	19	20	2	
Papua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	32
	21	16	16	16	14	10	5	
Nusa Tenggara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	33
Timur	04	03	01	01	01	02	2	

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi terendah tingkat inklusifitaskeuangannya, kemudian di atasnya ada Papua dan Maluku. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dan juga tingkat pendapatan perkapita ketiga provinsi yang masih sangat rendah.

Minimnya masyarakat yang bisa mengakses jasa perbankan dan belum meratanya jumlah kantor layanan perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku, menyebabkan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat terhimpun oleh perbankan juga menjadi rendah sehingga jumlah kredit yang dapat disalurkan juga semakin sedikit. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat rendah.

Dari segi budaya, hasil penelitian Soeriadiredja (2013) menggambarkan tentang hubungan yang saling mengasingkan dan menyisahkan antara dua kelompok masyarakat di wilayah NTT. Pengasingan dan penyisihan ini mengakibatkan sebagian masyarakat NTT tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jauh dari nilai-nilai edukasi khususnya dalam hal perekonomian sehingga angka kemiskinan dan keterbatasan di NTT semakin sulit diselesaikan. Hal inilah salah satu penyebab rendahnya nilai indeks inklusi keuangan syariah di NTT.

Konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia penyebab dan akibatnya sudah bersifat multidimensional yang menyangkut banyak orang dan

pihak asing sebagai investor. Dari beberapa penelitian yang ada yang membahas tentang proyek bahwa suatu proyek itu memiliki dampak sosial yang luas, seperti berupa berubahnya budaya, nilai-nilai tradisi sosial, perubahan mata pencaharian atau sumber penghasilan, kesenjangan sosial, perampasan hak adat (terutama tanah) dan marginalisasi masyarakat adat (Ngadisah, 2002). Masalah-masalah seperti kesenjangan sosial, pekerjaan yang tidak kunjung jelas dan lain sebagainya, menjadi penyebab masalah kemiskinan di Papua semakin sulit diatasi sehingga nilai indeks inklusi keuangan syariah Provinsi Papua sangat rendah.

Penduduk miskin terbanyak berada di Papua dan Maluku (Badan Pusat Statistik, 2018). Kemiskinan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, investasi publik serta rendahnya derajat kesehatan menurut Kartasmita dalam Jonaidi (2012). Tingkat kemiskinan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah serta kondisi kesehatan masyarakat yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap nilai indeks inklusi keuangan syariah provinsi tersebut.

Selain itu penyebab rendahnya indeks inklusi keuangan syariah di tiga provinsi tersebut adalah karena rendahnya indeks literasi keuangan syariah di ketiga provinsi tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 secara berurutan NTT sebesar 1,31%, Papua sebesar 4,72% dan Maluku sebesar 5,25%. Selanjutnya berikut ini adalah 10 besar provinsi dengan indeks inklusi keuangan syariah tertinggi.



Gambar 8 10 Besar Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Sumber: Penulis (2021)

Adapun Provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan syariah tertinggi adalah DKI Jakarta dengan perolehan nilai indeks inklusi keuangan syariah sebesar 0,531 yang memperlihatkan rata-rata indeks yang terus meningkat dari 2015-2019 yakni dari angka 0,448 ke angka 0,583 walaupun sempat mengalami penurunan menjadi 0,580 di tahun 2020 disebabkan menjalarnya Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian hampir di seluruh provinsi Indonesia termasuk DKI Jakarta, yang merupakan provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak. Selanjutnya provinsi yang menempati urutankedua dan ketiga secara berurutan adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DI Yogyakarta, masing-masing nilainya adalah 0,435 dan 0,192 (lihat Gambar 8).

Adapun perbedaan hasil Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Perbandingan Nilai IFI Dengan Penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul	Objek Penelitian	Periode Penelitian	Hasil	
				Top 10	Top 3
Hikmahul Azis	Analisis Perputaran Uang (M1) di Bank Syariah di 10 Provinsi di Indonesia melalui Pengaruh Aspek-aspek Kualitatif Nilai Perputaran	BSU, BUS & BWS	2005-2009	1. DKI Jakarta (0,48) 2. Nanggroe Aceh Darussalam (0,44) 3. DI Yogyakarta (0,38)	1. DKI Jakarta (0,48) 2. Nanggroe Aceh Darussalam (0,44) 3. DI Yogyakarta (0,38)
Fitri Murniasari	Developing Syariah Finance and Islamic Index For Islamic Banks in Indonesia: A Cross-Province Analysis	BUS & BUS	2014-2017	1. DKI Jakarta (0,48) 2. Jawa Timur (0,44) 3. Nanggroe Aceh Darussalam (0,38)	1. DKI Jakarta (0,48) 2. Jawa Timur (0,44) 3. Nanggroe Aceh Darussalam (0,38)
				1. DKI Jakarta (0,48)	1. DKI Jakarta (0,48)

Sumber: Penulis (2021)

Dalam penelitian ini maupun lima penelitian terdahulu lainnya menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih dalam kategori rendah dibuktikan dengan seluruh penelitian dalam tabel menunjukkan rata-rata berada pada angka 0,1. Selain itu mayoritas penelitian dalam tabel menyebutkan bahwa provinsi dengan indeks inklusi keuangan syariah tertinggi adalah DKI Jakarta dan provinsi terendah adalah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Top 3 ISFI dalam penelitian penulis yakni DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dan DI Yogyakarta, hal tersebut beriringan dengan apa yang ditemukan oleh Puspitasari et al., (2020) dan Isrowiyah, (2019).

Korelasi Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kualitas Hidup Perempuan (IPG)

Sub bagian berikut ini menyelidikikorelasi antara indeks inklusi keuangan syariah dan IPG 33 provinsi di Indonesia. Data yang berkaitan dengan IPG diambil dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Tabel 12 menggambarkan distribusi IPG 33 provinsi yang dijadikan sebagai salah satu indikator perhitungan kualitas hidup perempuan dari tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Gender 33 Provinsi di Indonesia

Indeks Pembangunan Gender

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average
Bali	92,71	93,20	93,70	93,71	93,72	93,79	93,47
Bangka Belitung	88,37	88,90	88,93	89,15	89,00	88,92	88,88
Banten	91,11	90,97	91,14	91,30	91,67	91,74	91,32
Bengkulu	91,38	91,06	91,34	91,37	91,19	91,00	91,22
D.I Yogyakarta	94,41	94,27	94,39	94,73	94,77	94,80	94,56
DKI Jakarta	94,72	94,98	94,70	94,70	94,71	94,63	94,74
Gorontalo	85,87	86,12	86,64	86,63	86,83	86,73	86,47
Jambi	88,44	88,29	88,13	88,44	88,44	88,41	88,36
Jawa Barat	89,11	89,56	89,18	89,19	89,26	89,20	89,25
Jawa Tengah	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18	92,07
Jawa Timur	91,07	90,72	90,76	90,77	90,91	91,07	90,88
Kalimantan Barat	85,61	85,77	86,28	86,74	86,81	86,87	86,35
Kalimantan Selatan	88,55	88,86	88,60	88,61	88,61	88,86	88,68
Kalimantan Tengah	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03	89,08
Kalimantan Timur	85,07	85,60	85,62	85,63	85,98	85,70	85,60
Kepulauan Riau	93,22	93,13	92,96	92,97	93,10	93,31	93,12
Lampung	89,89	90,30	90,49	90,57	90,39	90,33	90,33
Maluku	92,54	92,38	92,75	93,03	93,04	92,97	92,79
Maluku Utara	88,86	89,15	89,15	89,50	89,61	89,55	89,30
Nanggroe Aceh Darussalam	92,07	91,89	91,67	91,67	91,84	92,07	91,87
Nusa Tenggara Barat	90,23	90,05	90,36	90,37	90,40	90,45	90,31
Nusa Tenggara Timur	92,91	92,72	92,44	92,57	92,72	92,73	92,68
Papua	78,52	79,09	79,38	80,11	80,05	79,59	79,46
Papua Barat	81,99	82,34	82,42	82,47	82,74	82,91	82,48
Riau	87,75	88,04	88,17	88,37	88,43	88,14	88,15
Sulawesi Barat	92,92	92,79	92,84	93,15	93,09	89,43	92,37
Sulawesi Selatan	89,52	89,35	89,44	90,05	89,76	92,86	90,16
Sulawesi Tengah	92,25	91,91	91,66	92,08	92,01	91,87	91,96
Sulawesi Tenggara	90,30	90,23	90,24	90,24	90,56	90,50	90,35
Sulawesi Utara	94,64	95,04	94,78	94,79	94,53	94,42	94,70
Sumatera Barat	94,74	94,42	94,16	94,17	94,09	94,17	94,29
Sumatera Selatan	92,22	92,08	92,43	92,62	92,40	92,38	92,36
Sumatera Utara	90,96	90,82	90,65	90,66	90,71	90,67	90,75
Indeks Pembangunan Gender	90,10	90,16	90,19	90,35	90,37	90,34	90,25

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi pemimpin dengan kualitas hidup perempuan terbaik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, karena di provinsi ini peran perempuan dalam pembangunan bernegara telah dilibatkan di berbagai bidang dan lini bisnis. Selain

itu fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan perempuan lebih lengkap, kemudian sistem pendidikan yang lebih baik dan fasilitas kesehatan yang memadai. Rata-rata IPG DKI Jakarta 2015- 2020 sebesar 94,74. Kemudian pada urutan kedua yakni Sulawesi Utara dengan nilai 94,70 dan DI Yogyakarta berada pada posisi ke 3 dengan perolehan nilai 94,56. Sebaliknya, Papua adalah provinsi dengan IPG terendah di Indonesia dengan nilai 79,46. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 7 di bawah.

Tabel 7 3 Provinsi dengan Nilai IPG Tertinggi dan Terendah

Index Perkembangan Gender								
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Average	Rank
DKI Jakarta	94.	94.	94.	94.	94.	94.	94.76	1
	72	98	70	70	71	63		
Sulawesi Utara	94.	95.	94.	94.	94.	94.	94.76	2
	64	04	78	79	53	42		
D.I Yogyakarta	94.	94.	94.	94.	94.	94.	94.51	3
Kalimantan Timur	85.	85.	85.	85.	85.	85.	85.58	31
	07	60	62	63	98	70		
Papua Barat	81.	82.	82.	82.	82.	82.	82.39	32
	99	34	42	47	74	91		
Papua	78.	79.	79.	80.	80.	79.	79.43	33
	52	09	38	11	05	59		

Meskipun rata-rata nasional telah mengalami peningkatan, berbagai perbedaan signifikan terjadi di tingkat daerah, baik yang memihak pada anak laki-laki maupun perempuan.

Tabel 8 Koefisien Korelasi

	ISFI	IPG
ISFI	1	0,261
IPG	0,261	1

Tabel 9 Hasil Running Uji Signifikansi Variabel

Dependent Variable: IPG
Method: Panel Least Squares
Date: 08/09/21 Time: 23:13
Sample: 2015 2020
Periods included: 6
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IFI	7.811120	2.062553	3.787112	0.0002
C	89.43565	0.317156	281.9923	0.0000
R-squared	0.068185	Mean dependent var		90.25278
Adjusted R-squared	0.063431	S.D. dependent var		3.379815
S.E. of regression	3.270866	Akaike info criterion		5.218037
Sum squared resid	2096.919	Schwarz criterion		5.251251
Log likelihood	-514.5856	Hannan-Quinn criter.		5.231481
F-statistic	14.34222	Durbin-Watson stat		0.023789
Prob(F-statistic)	0.000203			

Sumber: Penulis (2021)

Selanjutnya, hasil dari *pearson correlation* pada Tabel 8 dan Tabel 9 dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup perempuan (IPG) dengan nilai *r-pearson* 0,261, nilai koefisien ISFI sebesar 7,811 dan signifikansi sebesar 0,0002 (lebih kecil dari *alpha* 0,05). Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inklusi keuangan syariah akan mengakibatkan perubahan kualitas hidup Perempuan (IPG) secara searah atau jika indeks ISFI meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan indeks IPG sebesar 7,811. Provinsi dengan nilai indeks inklusi keuangan syariah tinggi juga memiliki nilai indeks pembangunan gender yang tinggi pula, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 15 DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dan DI Yogyakarta yang menjadi 3 provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi memiliki IPG yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Begitu juga dengan provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan rendah cenderung memiliki IPG yang rendah pula sebagaimana Provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu penelitian ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Ali et al., (2019), Isrowiyah, (2019) dan Umar, (2017) bahwa indeks inklusi keuangan syariah berkorelasi positif

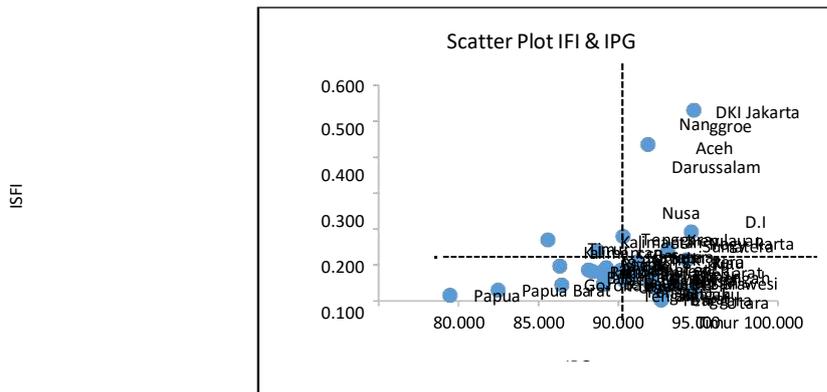
dengan IPM dan mendukung perkembangan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan, begitu juga dalam penelitian ini menunjukkan hasil ISFI berkorelasi positif dan signifikan terhadap kualitas hidup perempuan (IPG).

Kaitannya dengan indikator ketersediaan, perhatian kepada pengusaha perempuan juga harus ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disediakan perbankan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). Pemberian kredit kepada para pengusaha perempuan dan pemberian akses perbankan bagi para pengusaha UMKM perempuan akan dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi yang akan berdampak kepada meningkatnya kualitas hidup perempuan.

Terkait indikator aksesibilitas, perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan semakin meningkat, namun di lain pihak para pengusaha perempuan banyak yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari perbankan ataupun layanan keuangan lainnya. Padahal akses layanan perbankan dan fasilitas perbankan merupakan salah satu cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat (World Bank, 2013).

Sementara dari segi penggunaan, fenomena perempuan pengusaha di Indonesia menjadi sangat menarik untuk dilihat karena ternyata pengusaha perempuan mikro dan menengah sudah mulai memegang peranan penting dalam bidang usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perempuan ini ternyata mewakili 60% dari jumlah keseluruhan pengusaha mikro dan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam tahun-tahun terakhir ini, di kalangan negara dunia ketiga, dipelopori pula oleh lembaga internasional dunia (seperti PBB dan Bank Dunia), telah menekankan pentingnya kredit mikro untuk mengatasi kemiskinan di kalangan perempuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para perempuan miskin yang selama ini cenderung terabaikan (Pearson,

1992; Moser, 1992). Contoh paling nyata adalah keberhasilan Muhammad Yunus, di Banglades dengan Grammen Bank, India dengan SEWA, sepertiga total kredit mikro di dunia diterima kelompok sasaran perempuan di India (Elavia, 1994 dalam Panjaitan et al.,1999), termasuk pula di Indonesia.



Gambar 9 Scatter Plot Indeks ISFI dan IPG 33Provinsi di Indonesia

Tabel 10 Deskripsi Statistik

	IPG	IFI
Mean	90.25278	0.104611
Std. Dev.	3.379815	0.112986
Skewness	-1.205537	3.098406
Kurtosis	4.756546	13.51164
Jarque-Bera	73.41451	1228.384
Probability	0.000000	0.000000
Sum	17870.05	20.71300
Sum Sq. Dev.	2250.360	2.514869
Observations	198	198

Sumber: Penulis (2021)

Adapun rata-rata indeks inklusi keuangan syariah 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2020 adalah 0,105 dengan begitu ada 24 provinsi dengan nilai indeks dibawah rata-rata dan hanya ada 9 provinsi di atas rata-rata yakni DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau,

Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Provinsi yang memperoleh indeks inklusi keuangan syariah dengan nilai maksimal adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2020, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan indeks inklusi keuangan syariah terendah yakni pada tahun 2019. Selanjutnya untuk indeks pembangunan gender ada 20 provinsi dengan nilai di atas rata-rata dan ada 13 di bawah rata-rata. Dengan begitu provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 merupakan provinsi dengan IPG tertinggi dan Papua pada tahun 2015 merupakan provinsi terendah

Conclusion

Penelitian ini mengukur indeks inklusi keuangan syariah 33 provinsi di Indonesia berdasarkan tiga dimensi yakni aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan perbankan syariah. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang paling unggul dalam pengukuran indeks inklusi keuangan syariah dalam penelitian ini, dengan perolehan nilai masing-masing provinsi secara berurutan adalah 0,531 dan 0,435 atau dengan kata lain hanya 2 provinsi ini yang masuk kedalam kategori medium sisanya adalah provinsi dengan kategori inklusi keuangan rendah. Sebaliknya provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki posisi terendah tingkat indeks inklusi keuangan syariah dengan skor indeksnya 0,002.

Studi ini juga menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup perempuan (IPG) dengan nilai *r-pearson* 0,261, pada nilai koefisien ISFI sebesar 7,811 dan signifikansi sebesar 0,0002 (lebih kecil dari *alpha* 0,05). Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inklusi keuangan syariah akan mengakibatkan perubahan kualitas hidup Perempuan (IPG) secara searah atau jika indeks ISFI meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan indeks IPG sebesar 7,811. Provinsi dengan nilai indeks inklusi keuangan syariah tinggi juga memiliki nilai indeks pembangunan gender yang tinggi pula,

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 15 DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dan DI Yogyakarta yang menjadi 3 provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi memiliki IPG yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Begitu juga dengan provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan rendah cenderung memiliki IPG yang rendah pula sebagaimana provinsi Papua dan Papua Barat.

References

- Abbas, J. (2020). Inklusi Keuangan Syariah. In *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing Islamic Financial Inclusion Index for Islamic Banks in Indonesia: a Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691–712.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>
- Arnold, J., & Gammage, S. (2019). Gender and financial inclusion: the critical role for holistic programming. *Development in Practice*, 29(8), 965–973.
<https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1651251>
- Asmawati, & Ahmad, S. (2015). Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh: Case Study in Baitul Qiradh Aceh. *Kontekstualita*, 30(2), 154–165.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2012). *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal (Issue June)*.
<https://doi.org/10.1039/c1lc20670b>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019: Infrastructure Development in Indonesia*. 270.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2015). Indeks Pembangunan manusia (Metode Baru). In *Badan Pusat Statistik Indonesia (Vol. 2015, Issue September)*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>
- Bhandari, B. S. (2018). Life Insurance -Social Security & Financial Inclusion. *Bimaquest*, 18(2), 1–16. <https://doi.org/10.4018/ijabe.202010.0103>
- BP2MI. (2019). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. 29. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- BPS. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020.

Sensus Penduduk 2020, 6, 1-18.

- Chee, J. (2015). Pearson's Product Moment Correlation: Sample Analysis. *University of Hawaii at Mānoa School of Nursing*, 29 Mei 2015, 1-15.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1856.2726>
- Chioda, L. (2016). *Latin American and Caribbean Women in Search of a New Balance*. World Bank Group.
- Commision, E. (2008). *Financial Services Provision And Prevention of Financial Exclusion*.<https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/geography/migrated/documents/pfrc0806.pdf>
- Depkop. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar. *Www.Depkop.Go.Id*, 2000(1), 1.
- Elrahman, A., & Ali, E. S. (2019). Empowering Women through Financial Inclusion: Some Evidence from Comoros. *International Journal of Asian Social Science*, 9(2), 256-270.
<https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.92.256.270>
- Farlinger, S. (1996). Quality of Life for Women. *Kluwer Academic Publiahers*, 39(November), 109-119. Ghosh, S., & Vinod, D. (2017). What Constrains Financial Inclusion for Women? Evidence from Indian Micro data. *World Development*, 92,60-81.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.011>
- google, TEMASEK, & COMPANY, B. &. (2019). *e-Conomy SEA 2019*.
- Gupta, A., Chotia, V., & Rao, N. M. (2014). Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(5), 1-23.
- Hannig, A., & Jansen, S. (2011). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. In *Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets* (Issue 259). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1729122>
- Ihsan, M., & Azwar. (2018). ANALISIS EMPIRIS INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal BPPK*, 11(2),12-34.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2nded*. John Wiley & Sons.
- Isrowiyah, N. (2019). Indeks Inklusi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Skripsi*, 8(5), 55.
- Japhta, R., Murthy, P., Fahmi, Y., Marina, A., & Gupta, A. (2016). UKM yang dimiliki

- Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal. *International Finance Corporation*, 32–44.
- Kementerian Koordinator BidangPerekonomian RI. (2020). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk Perempuan Indonesia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. (2019). Profil Perempuan Indonesia 2019. *Profil Perempuan Indonesia*.
- KPPPA. (2019). *Pembangunan ManusiaBerbasis Gender 2019*.
- Kumari, T., & Azam, F. (2019). The Mediating Effect of FinancialInclusion on Financial Literacy and Women’s Economic Empowerment: A Study Among Rural Poor Women in Sri Lanka. *International Journal ofScientific and Technology Research*, 8(12), 719–729.
- Mahadi, N. A., Mazli, S. A., & Muneeza, A. (2019). Islamic Financial Wealth Management: Empowering Womenin Islamic Societies. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(3), 116–129.
<https://doi.org/10.18646/2056.63.19-008>
- Mehra, R. (2012). Women, Empowerment, and Economic Development. *Sage Publications, Annals of the AmericanAcademy of Political and SocialScience*, 554, 136–149.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and The Path to Human and Economic Development, Islam and The Path to Human and Economic Development*.
<https://doi.org/10.1057/9780230110014>
- Miraza, B. H. (2014). Building Inclusive Finance. *Journal of Management andAccounting Economics*, 23(2).
- Mohieldin, M., Bank, W., Iqbal, Z., Bank, W., & Rostom, A. (2012). The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC)Countries. *Islamic Economic Studies*,20(2).
- Moser, Caroline, *Third World Policy Ap- proaches to Women in Development* (London: Routledge, 1992).
- Muhammad, I. N. (2018). *Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing CashWaaf for Preventing Rural-Urban Girl-Child Hawking in Kano, Nigeria*. 33, 1–7.
- Napier, M., Melamed, C., Taylor, G., & Jaeggi, T. (2013). Promoting women’s financial inclusion. In A. D.Lindi Hlan, Zoe Stephenson (Ed.), *Department for International Development* (DFID) London and East Kilbride. Department for International Development) (DFID)London and East Kilbride.
- Ngadisah, 2002 *Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika: Studi kasus Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport*, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, FISIP- UI Edisi 10 2002.

- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, 9(1), 83–100. <http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/79>
- OJK. (2019). *Survei Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Indonesia*.
- Panjaitan, Rosintan D. M., Drioadisuryo & Kathleen Cloud, "Gender, Self -Employment and a Micro Credit Program: An Indonesian Case Study," dalam *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 39 (5), 1999:94-105.
- Pearson, Ruth. (1992). *Gender Matter in Development*. New York: Oxford University Press.
- Peraturan Presiden. (2020). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. 051209.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Resendiz, R. M. (2017). *The Role of Payment Systems and Services in Financial Inclusion* (Issue July).
- Sakanko, M. A. (2020). Financial Inclusion and Women Participation in Gainful Employment: an Empirical Analysis of Nigeria. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1(2), 1–14.
- Sanjaya, I. M., & Nursechafia, N. (2016). Financial Inclusion and Inclusive Growth: a Cross-Province Analysis in Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 18(January), 281–306. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i3.551>
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. In *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development Working* (No. 07).
- Setu, F. (2020, November 20). Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, Akses Internet Makin Terjangkau. *Kominfo.Go.Id*. https://kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasil-survei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*. Lentera Hati.
- Soeriadiredja, P. (2013). Merapu: Konstruksi identitas budaya orang Sumba, NTT. *Antropologi Indonesia*, 36(1).

- Tavakoli-Fard, N., Mortazavi, S. A., Kuhpayehzadeh, J., & Nojomi, M. (2016). Quality of life, Work ability and other important indicators of women's occupational health. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 29(1), 77-84.
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(Juli), 99-126.
- UNDP. (n.d.). *Gender Inequality index*. United Nations Development Programs. <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>
- Utomo, A. J., Faizah, A. N., Yulianti, L., Tjandaningsih, I., Ismalia, P., & Sigiro, A. N. (2018). Perempuan dan Ekonomi Perawatan. *Jurnal Perempuan*, 23(4), 249. <https://doi.org/10.34309/jp.v23i4.278>
- World Bank. (n.d.). *Financial Inclusion*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
- World Bank. (2017). *Global Financial Inclusion Index (FINDEX)*. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ov.pdf>
- Yaumidin, U. K., Suhodo, D. S., Yuniarti, P.I., & Hidayatina, A. (2017). Financial Inclusion for Women: Impact Evaluation on Islamic Microfinance to Women's Empowerment in Indonesia. In *Financial Inclusion and Poverty Alleviation*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_3